
Ketimpangan Maritim dan Akses Pendidikan: Studi Sosiologi Pendidikan atas Ketergantungan Mahasiswa Kepulauan pada Kapal Pelni

Alimin Alwi

Jurusan Sosiologi dan Antropologi,
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum,
Universitas Negeri Makassar
E-mail: alimin.alwi@unm.ac.id

Abstrak

Ketimpangan akses pendidikan di wilayah kepulauan Indonesia tidak hanya dipengaruhi faktor ekonomi dan sosial, tetapi juga oleh keterbatasan mobilitas geografis. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana ketergantungan mahasiswa kepulauan terhadap transportasi laut, khususnya kapal Pelni, memengaruhi akses pendidikan tinggi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi. Data diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap 25 mahasiswa asal wilayah kepulauan di Indonesia Timur yang sedang menempuh pendidikan tinggi serta menggunakan kapal Pelni selama studi di Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapal Pelni berfungsi sebagai infrastruktur pendidikan yang memungkinkan mobilitas akademik mahasiswa dari daerah terpencil menuju pusat-pusat pendidikan tinggi. Meskipun demikian, keterbatasan jadwal pelayaran, tingginya durasi perjalanan, dan biaya mobilitas menciptakan bentuk ketimpangan pendidikan yang khas di wilayah kepulauan. Di sisi lain, perjalanan menggunakan kapal Pelni juga menjadi ruang pembentukan modal sosial melalui interaksi antarmahasiswa dan jaringan perantaraan. Penelitian ini menawarkan konsep *ketimpangan pendidikan maritim* sebagai bentuk ketidaksetaraan pendidikan yang muncul akibat perbedaan akses terhadap infrastruktur transportasi laut. Temuan ini memperluas kajian sosiologi pendidikan dengan menempatkan mobilitas geografis sebagai faktor penting dalam reproduksi ketimpangan pendidikan.

Kata kunci: ketimpangan pendidikan; mahasiswa kepulauan; mobilitas maritim; modal sosial; kapal pelni

Maritime Inequality And Access To Education: A Sociology Of Education Study On The Dependence Of Island Students On Pelni Ships

Abstract

Inequalities in access to education in Indonesia's island regions are influenced not only by economic and social factors but also by limited geographical mobility. This study aims to analyze how the dependence of students from island regions on maritime transportation specifically Pelni ships affects their access to higher education. The study employs a qualitative approach using phenomenological methods. Data were collected through in-depth interviews with 25 students from island regions in Eastern Indonesia who are pursuing higher education in Makassar. The findings indicate that Pelni ships serve as educational infrastructure enabling academic mobility for students from remote areas to higher education centers. However, limited sailing schedules, long travel durations, and high mobility costs create a distinct form of educational inequality in island regions. On the other hand, travel via Pelni ships also serves as a space for the formation of social capital through student interactions and migrant networks. This study introduces the concept of maritime educational inequality as a form of educational disparity arising from differences in access to maritime transportation infrastructure. These findings expand the field of the sociology of education by positioning geographical mobility as a key factor in the reproduction of educational inequality.

Keywords: *educational inequality; students from the islands; maritime mobility; social capital; pelni ships*

PENDAHULUAN

Ketimpangan pendidikan merupakan isu sentral dalam kajian sosiologi pendidikan. Sebagian besar penelitian menjelaskan ketimpangan pendidikan melalui faktor ekonomi, modal budaya, status sosial, dan kualitas institusi pendidikan (Enchikova et al., 2024; Hermans et al., 2025; C. Y. Tan, 2024; G. L. C. Tan & Fang, 2023; Wu & Wang, 2025). Namun demikian, dalam konteks negara kepulauan yaitu Indonesia, faktor geografis menjadi dimensi penting yang sering terabaikan. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam pemerataan akses pendidikan tinggi. Konsentrasi perguruan tinggi berkualitas masih terpusat di kota-kota besar seperti Makassar, Surabaya, Yogyakarta, Bandung, dan Jakarta. Kondisi ini mendorong mahasiswa dari pulau-pulau kecil untuk melakukan mobilitas pendidikan menuju pusat-pusat pendidikan tersebut.

Dalam fokus kajian ini, kapal Pelni memiliki peran strategis sebagai penghubung antara wilayah kepulauan dan pusat pendidikan. Pemerintah melalui program pelayanan publik terus menugaskan Pelni untuk memperkuat konektivitas wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) melalui layanan transportasi laut yang terjangkau. Meskipun demikian, penelitian mengenai hubungan antara transportasi laut dan akses pendidikan masih sangat terbatas. Sebagian besar kajian transportasi maritim berfokus pada aspek ekonomi, logistik, dan konektivitas wilayah (Ducruet, 2020; Faure & Ducruet, 2026; Li et al., 2023). Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan: bagaimana ketergantungan mahasiswa kepulauan terhadap kapal Pelni memengaruhi akses pendidikan tinggi dan reproduksi ketimpangan pendidikan?

Persoalan akses pendidikan di wilayah kepulauan tidak dapat dilepaskan dari karakteristik geografis Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau dengan tingkat konektivitas yang berbeda-beda. Bagi masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan, akses menuju perguruan tinggi

umumnya dapat ditempuh melalui berbagai moda transportasi yang tersedia setiap hari. Sebaliknya, bagi masyarakat yang tinggal di pulau-pulau kecil dan daerah terluar, perjalanan menuju pusat pendidikan sering kali memerlukan waktu sehari-hari dengan biaya yang tidak sedikit. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesempatan memperoleh pendidikan tinggi tidak hanya ditentukan oleh kemampuan akademik dan ekonomi, tetapi juga oleh kemampuan untuk mengatasi hambatan geografis.

Dalam perspektif sosiologi pendidikan, ketimpangan akses pendidikan merupakan hasil dari distribusi sumber daya yang tidak merata dalam masyarakat. Pierre Bourdieu menjelaskan bahwa keberhasilan pendidikan sangat dipengaruhi oleh kepemilikan modal ekonomi, modal budaya, dan modal sosial. Namun, dalam konteks masyarakat kepulauan, terdapat dimensi lain yang turut menentukan peluang pendidikan, yaitu akses terhadap infrastruktur mobilitas. Infrastruktur transportasi menjadi sarana yang memungkinkan individu berpindah dari ruang geografis yang terbatas menuju ruang sosial yang menyediakan peluang pendidikan yang lebih luas. Dengan demikian, mobilitas bukan sekadar perpindahan fisik, melainkan juga mekanisme yang memungkinkan seseorang memperoleh sumber daya pendidikan.

Keterkaitan antara mobilitas dan pendidikan semakin relevan ketika dikaitkan dengan teori mobilitas (*mobilities theory*) yang dikembangkan oleh John Urry (Gossling, 2023). Menurut teori ini, mobilitas merupakan aspek fundamental dalam kehidupan sosial modern karena menentukan kemampuan individu untuk mengakses berbagai sumber daya, jaringan sosial, dan peluang kehidupan. Individu yang memiliki akses mobilitas yang baik akan lebih mudah memperoleh pendidikan, pekerjaan, dan layanan sosial lainnya dibandingkan mereka yang memiliki mobilitas terbatas. Dalam konteks wilayah kepulauan, kemampuan untuk melakukan mobilitas sangat bergantung pada keberadaan transportasi laut yang menghubungkan pulau-pulau dengan

pusat-pusat aktivitas ekonomi dan pendidikan.

Kapal Pelni menjadi salah satu bentuk infrastruktur mobilitas yang memiliki fungsi strategis dalam menghubungkan wilayah-wilayah yang terpisah oleh lautan. Bagi banyak mahasiswa dari kawasan Indonesia Timur seperti Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua, Kepulauan Selayar, dan Wakatobi, kapal Pelni bukan sekadar alat transportasi, melainkan sarana utama yang memungkinkan mereka mengakses pendidikan tinggi. Harga tiket yang relatif terjangkau dibandingkan transportasi udara menjadikan kapal Pelni sebagai pilihan utama bagi mahasiswa dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi. Dalam banyak kasus, keberadaan kapal Pelni menentukan apakah seseorang dapat melanjutkan pendidikan tinggi atau tidak.

Meskipun demikian, ketergantungan terhadap transportasi laut juga menghadirkan berbagai tantangan yang berpotensi memperkuat ketimpangan pendidikan. Jadwal pelayaran yang terbatas menyebabkan mahasiswa harus menyesuaikan aktivitas akademiknya dengan jadwal keberangkatan kapal. Tidak jarang mahasiswa mengalami keterlambatan mengikuti perkuliahan, registrasi akademik, maupun ujian akibat perubahan jadwal pelayaran atau kondisi cuaca yang tidak mendukung. Selain itu, perjalanan laut yang membutuhkan waktu beberapa hari menciptakan biaya sosial dan ekonomi tambahan yang tidak dialami oleh mahasiswa yang tinggal di wilayah perkotaan atau daratan utama.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa akses pendidikan tinggi di wilayah kepulauan memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan wilayah lain. Ketimpangan pendidikan tidak hanya muncul dalam bentuk perbedaan kualitas sekolah, kemampuan ekonomi keluarga, atau kepemilikan modal budaya, tetapi juga dalam bentuk ketimpangan mobilitas. Mahasiswa yang berasal dari daerah dengan konektivitas transportasi terbatas harus mengeluarkan sumber daya yang lebih besar untuk memperoleh

kesempatan pendidikan yang sama dengan mahasiswa dari wilayah yang lebih mudah dijangkau. Dengan kata lain, hambatan geografis secara tidak langsung menciptakan biaya tambahan yang berkontribusi terhadap reproduksi ketimpangan pendidikan.

Di sisi lain, perjalanan menggunakan kapal Pelni juga menghasilkan dinamika sosial yang menarik. Kapal tidak hanya menjadi ruang perpindahan fisik, tetapi juga ruang interaksi sosial yang memungkinkan terbentuknya jaringan sosial baru. Selama perjalanan, mahasiswa berinteraksi dengan sesama perantau, alumni, pekerja migran, maupun masyarakat dari berbagai daerah. Interaksi tersebut berpotensi menghasilkan modal sosial yang bermanfaat dalam proses adaptasi di lingkungan pendidikan baru. Informasi mengenai tempat tinggal, beasiswa, organisasi kemahasiswaan, dan peluang kerja sering kali diperoleh melalui jaringan sosial yang terbentuk selama perjalanan laut. Dengan demikian, kapal Pelni dapat dipahami sebagai ruang sosial yang turut berkontribusi dalam proses pembentukan modal sosial mahasiswa kepulauan.

Meskipun memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas pendidikan, kajian mengenai kapal Pelni dalam perspektif sosiologi pendidikan masih sangat terbatas. Sebagian besar penelitian terdahulu menempatkan transportasi laut sebagai aspek pendukung pembangunan ekonomi, perdagangan, dan konektivitas wilayah. Penelitian yang secara khusus mengkaji hubungan antara transportasi maritim dan akses pendidikan masih jarang ditemukan, terutama yang menyoroti pengalaman mahasiswa dari wilayah kepulauan. Kekosongan kajian ini menunjukkan perlunya penelitian yang mampu menjelaskan bagaimana infrastruktur transportasi laut berperan dalam membentuk peluang pendidikan dan memengaruhi reproduksi ketimpangan sosial.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kapal Pelni dalam mendukung akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa

kepulauan serta mengidentifikasi berbagai bentuk ketimpangan yang muncul akibat ketergantungan terhadap transportasi laut. Penelitian ini juga berupaya mengembangkan konsep ketimpangan pendidikan maritim (*maritime educational inequality*) sebagai kerangka konseptual untuk memahami hubungan antara mobilitas geografis, akses pendidikan, dan reproduksi ketimpangan sosial dalam masyarakat kepulauan. Melalui pendekatan sosiologi pendidikan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan kajian ketimpangan pendidikan sekaligus menjadi dasar bagi perumusan kebijakan yang lebih sensitif terhadap kebutuhan masyarakat kepulauan di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain fenomenologi (Creswell & Inoue, 2025; Unaradjan, 2019; Vagle, 2018; Zahavi, 2025) untuk memahami pengalaman subjektif mahasiswa kepulauan dalam mengakses pendidikan tinggi melalui transportasi laut. Pendekatan fenomenologi dipilih karena cocok peneliti menggali makna yang diberikan oleh informan terhadap pengalaman mereka selama menggunakan kapal Pelni sebagai sarana mobilitas pendidikan. Penelitian dilaksanakan di Kota Makassar, yang merupakan salah satu pusat pendidikan tinggi terbesar di Indonesia Timur dan menjadi tujuan utama mahasiswa dari berbagai wilayah kepulauan.

Informan penelitian berjumlah 25 mahasiswa kepulauan yang dipilih secara purposif berdasarkan beberapa kriteria wilayah yaitu berasal dari wilayah kepulauan sedang menempuh pendidikan tinggi di Makassar, serta sering menggunakan kapal Pelni selama masa studi. Informan berasal dari Kabupaten Wakatobi berjumlah 4 orang, mahasiswa dari Kota Bau-bau berjumlah 3 orang, kabupaten buton Tengah 3 orang, Buton berjumlah 2 orang, Buton Selatan 2 orang, Kabupaten Muna 2 orang, Buton Utara berjumlah 2 orang, Kepulauan Selayar 2 orang, Maluku 1 orang, Maluku Utara 2

orang, Nusa Tenggara Timur 1 orang, dan Papua 1 orang. Kriteria strata pendidikan yaitu jenjang Strata Satu (S1) berjumlah 15 mahasiswa, Strata dua (S2) berjumlah 8 orang dan Strata tiga (S3) berjumlah 2 orang. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali pengalaman, persepsi, dan tantangan yang dihadapi mahasiswa dalam mobilitas pendidikan. Observasi dilakukan untuk memahami konteks sosial kehidupan mahasiswa perantau, sedangkan dokumentasi digunakan sebagai data pendukung. Analisis data dilakukan secara bertahap melalui reduksi data, kategorisasi tema, interpretasi sosiologis, dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara mobilitas maritim dan akses pendidikan tinggi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kapal Pelni sebagai Infrastruktur Pendidikan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh informan memandang kapal Pelni sebagai sarana transportasi utama yang memungkinkan mereka mengakses pendidikan tinggi di Kota Makassar. Bagi mahasiswa yang berasal dari wilayah kepulauan seperti Wakatobi, Kepulauan Selayar, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Papua, keberadaan kapal Pelni tidak hanya berfungsi sebagai alat transportasi, tetapi juga sebagai infrastruktur sosial yang mendukung keberlanjutan pendidikan mereka. Sebagian besar informan menyatakan bahwa keterbatasan kondisi ekonomi keluarga membuat transportasi udara sulit dijangkau sehingga kapal Pelni menjadi pilihan yang paling realistis untuk melakukan perjalanan menuju kota tujuan studi.

Seorang mahasiswa asal Kabupaten Buton Selatan menyatakan:

“Kalau tidak ada kapal Pelni, mungkin saya tidak bisa kuliah di Makassar karena biaya pesawat terlalu mahal.” (Informan I-10 Mahasiswa S1 Asal Buton Selatan).

Seorang Mahasiswa asal Kota Bau-bau mengatakan:

“Naik kapal bagi saya sangat bermanfaat bapak apalagi selain harga lebih terjangkau itu juga jadi opsi pertama untuk berangkat naik kapal.” (Informan I-05 Mahasiswa S2 asal Kota Bau).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa akses pendidikan tidak hanya bergantung pada kemampuan akademik dan motivasi individu, tetapi juga dipengaruhi oleh tersedianya sarana transportasi yang dapat menghubungkan wilayah asal dengan pusat-pusat pendidikan tinggi. Dalam konteks ini, kapal Pelni berperan sebagai jembatan yang mempertemukan aspirasi pendidikan masyarakat kepulauan dengan peluang pendidikan yang tersedia di kota-kota besar.

Temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa keputusan untuk melanjutkan pendidikan tinggi sering kali dipengaruhi oleh keberadaan jalur pelayaran yang menghubungkan daerah asal dengan Makassar. Beberapa informan mengungkapkan bahwa keluarga mereka merasa lebih yakin mengizinkan anaknya merantau karena terdapat akses transportasi laut yang relatif terjangkau dan tersedia secara rutin. Dengan demikian, kapal Pelni tidak hanya mendukung mobilitas fisik mahasiswa, tetapi juga memberikan rasa aman dan kepastian bagi keluarga yang ditinggalkan di daerah asal.

Dari perspektif sosiologi pendidikan, temuan ini menunjukkan bahwa akses pendidikan merupakan hasil interaksi antara faktor individu dan faktor struktural. Selama ini, ketimpangan pendidikan sering dijelaskan melalui perbedaan modal ekonomi, modal budaya, dan modal sosial sebagaimana dikehendaki oleh Pierre Bourdieu. Namun, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa infrastruktur transportasi juga merupakan faktor penting yang menentukan kesempatan pendidikan seseorang. Mahasiswa yang tinggal di wilayah dengan konektivitas transportasi yang baik memiliki peluang lebih besar untuk melanjutkan pendidikan dibandingkan

mereka yang berada di wilayah yang akses transportasinya terbatas.

Selain berfungsi sebagai sarana mobilitas, kapal Pelni juga berperan sebagai bagian dari infrastruktur pendidikan nasional. Infrastruktur pendidikan umumnya dipahami sebagai gedung sekolah, ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas pendukung lainnya. Akan tetapi, dalam konteks masyarakat kepulauan, infrastruktur pendidikan harus dipahami secara lebih luas, mencakup sarana yang memungkinkan peserta didik mencapai lembaga pendidikan tersebut. Tanpa adanya transportasi yang memadai, keberadaan perguruan tinggi berkualitas di kota-kota besar tidak akan sepenuhnya dapat diakses oleh masyarakat dari wilayah terpencil.

Lebih jauh, hasil penelitian menunjukkan bahwa kapal Pelni berkontribusi dalam mengurangi dampak ketimpangan spasial yang masih menjadi karakteristik pembangunan pendidikan di Indonesia. Konsentrasi perguruan tinggi unggulan di wilayah perkotaan menyebabkan mahasiswa dari pulau-pulau kecil harus melakukan mobilitas geografis untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik. Dalam situasi tersebut, kapal Pelni menjadi instrumen yang memungkinkan terjadinya mobilitas pendidikan antar-pulau. Keberadaannya membantu memperluas jangkauan pendidikan tinggi hingga ke wilayah yang secara geografis terisolasi (Yudistira et al., 2025).

Temuan ini mengindikasikan bahwa kebijakan transportasi maritim memiliki implikasi yang signifikan terhadap pemerataan pendidikan. Kapal Pelni bukan sekadar moda transportasi publik, melainkan bagian dari mekanisme negara dalam memperluas kesempatan pendidikan bagi masyarakat kepulauan. Oleh karena itu, upaya peningkatan konektivitas maritim, penambahan frekuensi pelayaran, serta peningkatan kualitas layanan transportasi laut dapat dipandang sebagai investasi sosial yang berkontribusi terhadap peningkatan akses pendidikan dan pengurangan ketimpangan pendidikan di Indonesia. Dengan demikian, kapal

Pelni dapat dipahami sebagai infrastruktur pendidikan yang berperan strategis dalam menghubungkan ruang geografis yang terpisah dan membuka peluang mobilitas sosial melalui pendidikan tinggi.

Waktu dalam Akses Pendidikan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa kepulauan mengalami bentuk ketimpangan yang tidak hanya berkaitan dengan biaya pendidikan, tetapi juga berkaitan dengan waktu yang harus mereka korbankan untuk mengakses pendidikan tinggi. Ketimpangan waktu (*temporal inequality*) ini muncul karena mahasiswa dari wilayah kepulauan harus menempuh perjalanan yang jauh lebih lama dibandingkan mahasiswa yang berasal dari daerah perkotaan atau wilayah yang memiliki akses transportasi darat yang memadai. Mahasiswa asal Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Papua umumnya membutuhkan waktu perjalanan antara dua hingga tujuh hari untuk mencapai Kota Makassar. Lamanya perjalanan tersebut dipengaruhi oleh jarak antarpulau, jadwal pelayaran kapal, serta kondisi cuaca yang sering kali tidak dapat diprediksi.

Salah seorang mahasiswa asal Kabupaten Buton mengungkapkan:

“Kalau musim ombak besar, jadwal kapal sering berubah. Pernah saya terlambat masuk kuliah karena kapal ditunda beberapa hari. Saat sampai di Makassar, perkuliahan sudah berjalan dan saya harus mengejar materi yang tertinggal.” (Informan I-08 Mahasiswa S2 Asal Kabupaten Buton)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa hambatan geografis dapat bertransformasi menjadi hambatan akademik yang nyata (Rossi et al., 2026). Keterlambatan perjalanan menyebabkan mahasiswa kesulitan menyesuaikan diri dengan jadwal akademik yang telah ditetapkan kampus. Beberapa informan mengaku pernah terlambat melakukan registrasi semester, tidak dapat mengikuti perkuliahan pada minggu pertama, serta mengalami kendala dalam mengikuti ujian

dan kegiatan akademik lainnya akibat perubahan jadwal pelayaran. Temuan ini memperlihatkan bahwa waktu merupakan sumber daya yang tidak terdistribusi secara merata dalam sistem pendidikan tinggi. Mahasiswa yang tinggal di wilayah dengan konektivitas transportasi yang baik dapat mengakses kampus dalam waktu singkat, sedangkan mahasiswa kepulauan harus menginvestasikan waktu yang jauh lebih besar hanya untuk mencapai tempat studi (Wladis et al., 2024). Akibatnya, mereka menghadapi risiko kehilangan kesempatan akademik yang tidak dialami oleh mahasiswa lainnya.

Dalam perspektif sosiologi pendidikan, kondisi tersebut menunjukkan adanya ketimpangan struktural yang bersumber dari faktor geografis dan infrastruktur transportasi. Ketimpangan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan perbedaan kemampuan ekonomi atau modal budaya, tetapi juga dengan kemampuan individu untuk mengakses ruang pendidikan dalam waktu yang tersedia (Bourdieu, 1986). Semakin besar waktu yang harus dikeluarkan untuk mobilitas pendidikan, semakin besar pula potensi hambatan yang dihadapi mahasiswa dalam menjalani proses akademik. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jarak geografis telah menciptakan ketimpangan temporal yang memengaruhi akses pendidikan tinggi mahasiswa kepulauan. Waktu perjalanan yang panjang, ketidakpastian jadwal pelayaran, dan risiko keterlambatan menjadi faktor yang secara tidak langsung memperkuat ketimpangan pendidikan antara mahasiswa kepulauan dan mahasiswa yang berasal dari wilayah dengan akses transportasi yang lebih baik. Oleh karena itu, upaya pemerataan pendidikan perlu mempertimbangkan aspek konektivitas transportasi sebagai bagian penting dalam mewujudkan kesempatan pendidikan yang lebih setara bagi seluruh masyarakat Indonesia (Urry, 2000).

Beban Ekonomi Mobilitas Pendidikan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mobilitas pendidikan tidak hanya menun-

tut pengorbanan waktu yang panjang, tetapi juga menimbulkan beban ekonomi yang cukup besar bagi mahasiswa kepulauan (Henderson, 2023). Bagi sebagian besar informan, biaya perjalanan menjadi salah satu pengeluaran terbesar selama menempuh pendidikan tinggi di Makassar. Berbeda dengan mahasiswa yang berasal dari daerah yang dekat dengan kampus, mahasiswa kepulauan harus mengalokasikan anggaran khusus untuk perjalanan antarpulau setiap kali berangkat maupun pulang ke daerah asal. Kondisi ini menjadikan biaya mobilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari biaya pendidikan mereka.

Meskipun kapal Pelni dikenal sebagai moda transportasi yang relatif lebih terjangkau dibandingkan transportasi udara, biaya yang harus dikeluarkan mahasiswa tidak hanya terbatas pada harga tiket kapal. Informan mengungkapkan bahwa mereka juga harus menanggung berbagai biaya tambahan seperti transportasi dari desa menuju pelabuhan keberangkatan, biaya penginapan sementara apabila jadwal kapal tidak sesuai dengan jadwal keberangkatan kendaraan lokal, serta biaya konsumsi selama perjalanan yang dapat berlangsung selama beberapa hari. Dalam beberapa kasus, mahasiswa juga harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membawa barang kebutuhan kuliah atau perlengkapan pribadi dari daerah asal ke kota tujuan studi.

Seorang mahasiswa asal Kabupaten Wakatobi mengungkapkan:

“Orang sering mengira kalau naik kapal itu murah, padahal yang mahal justru biaya sebelum dan sesudah naik kapal. Dari kampung saya harus naik kapal kecil dulu ke pelabuhan, lalu naik kendaraan ke kota. Kalau jadwal tidak cocok, saya harus menginap. Jadi sekali perjalanan ke Makassar bisa menghabiskan uang lebih dari yang saya perkirakan.” (Informan I-01 Mahasiswa S1 Asal Kabupaten Wakatobi).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa biaya mobilitas pendidikan memiliki dimensi yang lebih kompleks daripada sekadar harga tiket transportasi

utama. Mahasiswa harus menghadapi berbagai pengeluaran tidak langsung yang sering kali luput dari perhatian dalam pembahasan mengenai akses pendidikan. Bagi mahasiswa yang berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas, biaya-biaya tersebut menjadi beban yang cukup berat dan memengaruhi kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan akademik lainnya. Beberapa informan mengaku harus mengurangi pengeluaran untuk membeli buku, bahan kuliah, atau kebutuhan penunjang pembelajaran karena sebagian besar dana yang dimiliki telah digunakan untuk biaya perjalanan. Bahkan, terdapat mahasiswa yang memilih tidak pulang ke kampung halaman selama satu hingga dua tahun demi menghemat biaya transportasi. Keputusan tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan ekonomi tidak hanya memengaruhi akses awal terhadap pendidikan tinggi, tetapi juga memengaruhi kualitas pengalaman pendidikan yang dijalani selama masa studi (Henderson, 2023).

Dalam perspektif sosiologi pendidikan, temuan ini memperlihatkan bahwa ketimpangan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan biaya langsung pendidikan seperti uang kuliah atau biaya administrasi kampus. Bagi mahasiswa kepulauan, terdapat biaya tersembunyi (*hidden costs*) yang muncul akibat kondisi geografis dan keterbatasan infrastruktur transportasi. Biaya mobilitas tersebut menjadi faktor yang memperbesar kesenjangan kesempatan pendidikan antara mahasiswa dari wilayah kepulauan dan mahasiswa yang berasal dari daerah dengan akses transportasi yang lebih mudah.

Lebih jauh, kondisi ini menunjukkan bahwa lokasi geografis dapat memengaruhi distribusi peluang pendidikan melalui mekanisme ekonomi. Mahasiswa yang berasal dari pulau-pulau kecil harus mengeluarkan sumber daya yang lebih besar untuk memperoleh kesempatan pendidikan yang sama dengan mahasiswa lain. Dengan kata lain, mereka menghadapi biaya tambahan yang tidak dialami oleh mahasiswa dari wilayah perkotaan atau daerah yang dekat dengan pusat pendidikan.

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa mobilitas pendidikan memiliki konsekuensi ekonomi yang signifikan bagi mahasiswa kepulauan. Beban biaya transportasi, penginapan, dan konsumsi selama perjalanan menjadi faktor yang dapat menghambat keberlanjutan studi, terutama bagi mahasiswa dari keluarga berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, upaya pemerataan pendidikan di wilayah kepulauan tidak cukup hanya dilakukan melalui penyediaan beasiswa atau bantuan biaya kuliah, tetapi juga perlu mempertimbangkan dukungan terhadap biaya mobilitas pendidikan. Dengan demikian, akses pendidikan tinggi dapat menjadi lebih inklusif dan memberikan kesempatan yang lebih setara bagi mahasiswa yang berasal dari wilayah kepulauan Indonesia.

Kapal Pelni sebagai Ruang Pembentukan Modal Sosial

Salah satu temuan menarik dalam penelitian ini adalah peran kapal Pelni sebagai ruang pembentukan modal sosial bagi mahasiswa kepulauan. Selama ini kapal Pelni umumnya dipahami sebagai sarana transportasi yang menghubungkan berbagai wilayah kepulauan di Indonesia. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa kapal Pelni memiliki fungsi sosial yang jauh lebih luas. Perjalanan laut yang berlangsung selama beberapa hari menciptakan ruang interaksi yang memungkinkan terjalinnya hubungan sosial antara mahasiswa dengan berbagai individu yang memiliki latar belakang dan pengalaman yang beragam (Pantouvakis & Gerou, 2023). Dalam ruang tersebut, mahasiswa tidak hanya berpindah secara fisik dari daerah asal menuju kota tujuan pendidikan, tetapi juga membangun jaringan sosial yang berpotensi mendukung keberhasilan studi mereka.

Sebagian besar informan mengungkapkan bahwa mereka sering bertemu dengan senior kampus, alumni, sesama mahasiswa perantau, bahkan tokoh masyarakat yang memiliki pengalaman lebih dahulu merantau untuk menempuh pendidikan atau bekerja di kota besar. Interaksi yang terjadi selama perjalanan

sering kali berkembang menjadi hubungan yang berlanjut setelah mereka tiba di kota tujuan (Alwi, 2025). Melalui hubungan tersebut, mahasiswa memperoleh berbagai informasi yang sangat berguna untuk menunjang kehidupan akademik dan sosial mereka.

Seorang mahasiswa asal Maluku Utara menjelaskan:

“Waktu pertama kali berangkat kuliah ke Makassar saya belum kenal siapa-siapa. Di kapal saya bertemu kakak tingkat dari kampus yang sama. Dia banyak membantu, mulai dari mencari tempat kos sampai mengenalkan saya dengan teman-teman daerah. Kalau tidak bertemu di kapal, mungkin saya akan lebih sulit beradaptasi.” (Informan I-22 Mahasiswa S2 Asal Maluku Utara)

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa perjalanan menggunakan kapal Pelni menjadi titik awal terbentuknya jaringan sosial yang berperan penting dalam proses adaptasi mahasiswa di lingkungan baru. Informasi mengenai tempat tinggal, kehidupan kampus, organisasi mahasiswa, hingga strategi menghadapi perkuliahan sering kali diperoleh melalui relasi yang dibangun selama perjalanan laut. Dalam banyak kasus, hubungan tersebut membantu mahasiswa mengurangi ketidakpastian yang mereka hadapi ketika pertama kali merantau.

Selain informasi mengenai kehidupan kampus, jaringan sosial yang terbentuk di kapal juga menjadi sumber informasi mengenai peluang beasiswa dan pekerjaan paruh waktu. Beberapa informan mengaku memperoleh informasi tentang program bantuan pendidikan dari senior atau alumni yang mereka temui selama perjalanan. Informasi tersebut kemudian membantu mereka memperoleh dukungan finansial yang sangat dibutuhkan untuk melanjutkan studi. Dengan demikian, jaringan sosial yang terbentuk di kapal tidak hanya memberikan dukungan emosional, tetapi juga menghasilkan manfaat ekonomi yang nyata.

Dalam perspektif Pierre Bourdieu, hubungan sosial semacam ini dapat

dipahami sebagai bentuk modal sosial (*social capital*), yaitu sumber daya yang diperoleh individu melalui keanggotaan dalam suatu jaringan sosial (Alwi, 2025; Gentry et al., 2025). Modal sosial memungkinkan seseorang memperoleh akses terhadap informasi, bantuan, dan peluang yang tidak selalu tersedia secara formal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kapal Pelni menjadi salah satu ruang penting dalam proses akumulasi modal sosial bagi mahasiswa kepulauan. Melalui interaksi yang terjadi selama perjalanan, mahasiswa membangun hubungan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung keberhasilan pendidikan mereka. Lebih jauh, temuan ini memperlihatkan bahwa perjalanan laut tidak hanya menghasilkan mobilitas geografis, tetapi juga mobilitas sosial. Ketika mahasiswa memperoleh akses terhadap informasi, jaringan, dan peluang yang sebelumnya tidak mereka miliki, mereka memiliki kesempatan yang lebih besar untuk meningkatkan posisi sosial melalui pendidikan. Dalam konteks ini, kapal Pelni berfungsi sebagai ruang sosial yang mempertemukan individu dari berbagai latar belakang dan memungkinkan terjadinya pertukaran sumber daya sosial yang bernilai.

Temuan penelitian ini memperluas pemahaman mengenai fungsi transportasi maritim dalam kehidupan masyarakat kepulauan. Kapal Pelni tidak hanya berperan sebagai penghubung antar-wilayah, tetapi juga sebagai arena interaksi sosial yang berkontribusi pada pembentukan modal sosial mahasiswa. Oleh karena itu, peran kapal Pelni dalam mendukung akses pendidikan tidak hanya terlihat dari kemampuannya memfasilitasi mobilitas fisik, tetapi juga dari kemampuannya menciptakan jaringan sosial yang membantu mahasiswa beradaptasi, bertahan, dan berkembang dalam lingkungan pendidikan tinggi. Dengan demikian, kapal Pelni dapat dipahami sebagai ruang yang menghubungkan mobilitas geografis dengan mobilitas sosial melalui pembentukan modal sosial di kalangan mahasiswa kepulauan.

Ketimpangan Pendidikan Maritim

Temuan penelitian ini dapat dipahami sebagai pengembangan dari literatur mengenai *transport poverty* dan *mobility justice*. Jika *transport poverty* menekankan keterbatasan akses transportasi sebagai penyebab eksklusi sosial, sedangkan *mobility justice* berfokus pada keadilan dalam distribusi kesempatan bermobilitas, maka penelitian ini menunjukkan bahwa pada konteks masyarakat kepulauan, keterbatasan mobilitas maritim menghasilkan bentuk ketidaksetaraan yang secara langsung memengaruhi akses dan keberlangsungan pendidikan tinggi. Dengan demikian, dimensi pendidikan menjadi fokus analisis utama yang belum dijelaskan secara eksplisit dalam kedua konsep tersebut.

Berdasarkan temuan lapangan, penelitian ini mengidentifikasi bentuk ketimpangan baru yang disebut sebagai ketimpangan pendidikan maritim (*maritime educational inequality*). Konsep ini merujuk pada ketidaksetaraan kesempatan pendidikan yang muncul akibat perbedaan akses terhadap infrastruktur transportasi laut yang menghubungkan wilayah kepulauan dengan pusat-pusat pendidikan (Yudistira et al., 2025). Temuan ini menunjukkan bahwa mahasiswa kepulauan menghadapi tantangan yang berbeda dibandingkan mahasiswa yang tinggal di wilayah perkotaan atau daerah yang memiliki akses transportasi yang lebih baik. Ketimpangan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi ruang, waktu, dan peluang pendidikan yang secara langsung memengaruhi pengalaman akademik mahasiswa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pertama dari ketimpangan pendidikan maritim adalah tingginya biaya mobilitas pendidikan. Mahasiswa dari wilayah kepulauan harus mengeluarkan biaya tambahan untuk perjalanan menuju perguruan tinggi yang tidak dialami oleh mahasiswa dari wilayah yang lebih dekat dengan pusat pendidikan. Biaya tersebut tidak hanya mencakup tiket kapal, tetapi juga biaya transportasi menuju pelabuhan,

biaya penginapan transit, dan biaya konsumsi selama perjalanan. Akibatnya, sebagian mahasiswa harus mengalokasikan sebagian besar sumber daya ekonomi mereka untuk mobilitas pendidikan, sehingga mengurangi kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan akademik lainnya.

Bentuk kedua adalah lamanya durasi perjalanan yang harus ditempuh mahasiswa kepulau. Informan dari Maluku, Nusa Tenggara Timur, dan Papua mengungkapkan bahwa perjalanan menuju Makassar dapat berlangsung selama beberapa hari. Waktu perjalanan yang panjang menyebabkan mahasiswa harus mengorbankan waktu belajar, waktu bersama keluarga, dan kesempatan mengikuti berbagai kegiatan akademik. Jarak geografis tidak hanya menjadi persoalan ruang, tetapi juga menghasilkan ketimpangan waktu yang berdampak pada kesempatan pendidikan (Wladis et al., 2024). Bentuk ketiga adalah ketidakpastian jadwal transportasi laut. Tidak seperti transportasi darat yang umumnya tersedia setiap hari, pelayaran kapal sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca, gelombang laut, dan kebijakan operasional. Perubahan jadwal keberangkatan atau keterlambatan kapal sering kali mengganggu rencana perjalanan mahasiswa. Salah seorang informan asal Papua menyatakan:

“Kami sering harus menyesuaikan jadwal kuliah dengan jadwal kapal, bukan sebaliknya. Kalau kapal terlambat atau ditunda karena cuaca, kami tidak punya banyak pilihan selain menunggu.” (Informan I-23 Mahasiswa S1 Asal Papua).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa kepulauan memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap sistem transportasi maritim. Ketika terjadi gangguan pada konektivitas laut, akses mereka terhadap pendidikan juga ikut terganggu. Bentuk keempat adalah risiko gangguan akademik yang muncul sebagai konsekuensi dari keterbatasan mobilitas. Beberapa informan mengaku pernah terlambat mengikuti registrasi semester, tidak hadir pada awal

perkuliahan, hingga kehilangan kesempatan mengikuti ujian atau kegiatan akademik penting akibat keterlambatan perjalanan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa hambatan transportasi dapat menghasilkan dampak akademik yang nyata. Dengan kata lain, ketimpangan pendidikan tidak hanya terjadi di ruang kelas, tetapi juga dalam proses mahasiswa mencapai ruang pendidikan tersebut.

Bentuk kelima adalah tingginya ketergantungan terhadap konektivitas maritim. Berbeda dengan mahasiswa di wilayah perkotaan yang memiliki berbagai alternatif transportasi, mahasiswa kepulauan sangat bergantung pada keberadaan kapal Pelni sebagai sarana utama mobilitas pendidikan. Ketika layanan transportasi laut terganggu, akses mereka terhadap kampus, keluarga, dan sumber daya pendidikan lainnya ikut terdampak. Ketergantungan ini menunjukkan bahwa kesempatan pendidikan di wilayah kepulauan sangat dipengaruhi oleh kualitas dan keberlanjutan layanan transportasi maritim.

Secara teoretis, temuan ini memperluas kajian sosiologi pendidikan yang selama ini lebih banyak menekankan faktor ekonomi, budaya, dan sosial sebagai sumber ketimpangan pendidikan. Penelitian ini menunjukkan bahwa infrastruktur mobilitas juga merupakan faktor penting yang memengaruhi distribusi kesempatan pendidikan. Dalam masyarakat kepulauan, akses terhadap pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan individu atau sumber daya keluarga, tetapi juga oleh kemampuan sistem transportasi untuk menghubungkan mereka dengan pusat-pusat pendidikan.

Dengan demikian, konsep ketimpangan pendidikan maritim dapat dipahami sebagai bentuk ketidaksetaraan pendidikan yang muncul akibat keterbatasan konektivitas transportasi laut (Fitzgerald et al., 2025). Konsep ini menegaskan bahwa geografi dan mobilitas merupakan dimensi penting dalam memahami ketimpangan pendidikan di negara kepulauan seperti Indonesia. Oleh karena itu, upaya pemerataan pendidikan perlu memper-

timbangkan kebijakan transportasi maritim sebagai bagian integral dari strategi pembangunan pendidikan yang berkeadilan. Ketika konektivitas laut diperkuat, kesempatan pendidikan bagi masyarakat kepulauan akan semakin terbuka, sehingga kesenjangan pendidikan antar-daerah dapat dikurangi secara lebih efektif.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa kepulauan tidak hanya ditentukan oleh faktor ekonomi, modal budaya, dan modal sosial, tetapi juga oleh kemampuan untuk mengakses infrastruktur mobilitas maritim. Kapal Pelni berfungsi sebagai infrastruktur pendidikan yang memungkinkan mahasiswa dari wilayah kepulauan memperoleh kesempatan melanjutkan studi ke perguruan tinggi di Kota Makassar. Dalam konteks masyarakat kepulauan, transportasi laut tidak sekadar menjadi sarana perpindahan fisik, melainkan bagian integral dari mekanisme yang membuka akses terhadap sumber daya pendidikan. Temuan penelitian mengungkap bahwa ketergantungan terhadap transportasi laut menghasilkan berbagai bentuk ketimpangan yang meliputi ketimpangan waktu, beban ekonomi mobilitas, ketidakpastian jadwal pelayaran, risiko gangguan akademik, serta tingginya ketergantungan terhadap konektivitas maritim. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hambatan geografis dapat bertransformasi menjadi hambatan pendidikan yang memengaruhi kesempatan akademik mahasiswa. Di sisi lain, perjalanan menggunakan kapal Pelni juga berkontribusi pada pembentukan modal sosial melalui terciptanya jaringan pertemanan, dukungan informasi, dan akses terhadap peluang pendidikan yang mendukung keberhasilan studi. Secara teoretis, penelitian ini menawarkan konsep ketimpangan pendidikan maritim (*maritime educational inequality*) sebagai bentuk ketidaksetaraan pendidikan yang muncul akibat perbedaan akses terhadap infrastruktur transportasi laut. Konsep ini memperluas kajian sosiologi pendidikan dengan menempatkan mobilitas geografis sebagai dimensi penting dalam reproduksi

ketimpangan pendidikan di negara kepulauan. Oleh karena itu, kebijakan pemerataan pendidikan perlu diintegrasikan dengan penguatan konektivitas maritim agar kesempatan pendidikan yang lebih adil dan inklusif dapat diwujudkan bagi masyarakat kepulauan Indonesia.

Beberapa keterbatasan penelitian ini perlu dicermati dalam Upaya mengintegrasikan temuan. Pertama, penelitian hanya dilakukan di Kota Makassar sebagai tujuan studi mahasiswa kepulauan, sehingga temuan belum sepenuhnya merepresentasikan pengalaman mahasiswa di pusat-pusat pendidikan tinggi lainnya di Indonesia. Kedua, penelitian ini berfokus pada mahasiswa yang menggunakan kapal Pelni sebagai moda transportasi utama, sehingga belum membandingkan pengalaman mahasiswa yang menggunakan moda transportasi lain, seperti transportasi udara atau kapal rakyat. Ketiga, penggunaan teknik purposive sampling bertujuan memperoleh informan yang memiliki pengalaman relevan, namun konsekuensinya hasil penelitian tidak dimaksudkan untuk digeneralisasikan kepada seluruh mahasiswa kepulauan di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan melibatkan lokasi penelitian yang lebih beragam, membandingkan berbagai moda transportasi antarpulau, serta menggunakan pendekatan mixed methods atau survei pada cakupan wilayah yang lebih luas untuk menguji dan memperkuat konsep ketimpangan pendidikan maritim yang dikembangkan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, A. (2025). Analisis Sosiologis Pola dan Faktor yang Memengaruhi Interaksi Sosial Antar Penumpang Kapal Pelni. *JKPM: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan Missio*, 17(2), 142–153.
- Alwi, A. (2025). Faith, Culture, and the River: Socio-Religious Dimensions of Waste Disposal Practices in Indonesia. *Reflektif, Jurnal Sosiologi*, 20(1), 161–184.
- Bourdieu, P. (1986). The Forms of Capital. In J. G. Richardson (Ed.), *Handbook*

- of Theory and Research for the Sociology of Education* (pp. 241–258). Greenwood Press.
- Creswell, J. W., & Inoue, M. (2025). A process for conducting mixed methods data analysis. *Journal of General and Family Medicine*, 26(1), 4–11.
- Ducruet, C. (2020). The Geography of Maritime Networks: A Critical Review. *Journal of Transport Geography*, 88, 102824.
- Enchikova, E., Neves, T., Toledo, C., & Nata, G. (2024). Change in Socioeconomic Educational Equity After 20 Years of PISA: A Systematic Literature Review. *International Journal of Educational Research Open*, 7, 100359.
- Faure, M.-A., & Ducruet, C. (2026). The Blue Connection. A Systematic and Critical Review of Shipping Network Research. *Networks and Spatial Economics*, 26(1), 129–188.
- Fitzgerald, A., Avirmed, T., & Battulga, N. (2025). Exploring the Factors Informing Educational Inequality in Higher Education: a Systematic Literature Review. *Perspectives: Policy and Practice in Higher Education*, 29(4), 199–209.
- Gentry, A. N., Martin, J. P., & Douglas, K. A. (2025). Social Capital Assessments in Higher Education: A Systematic Literature Review. *Frontiers in Education*, 9, 1–13.
- Gossling, S. (2023). Extending the Theoretical Grounding of Mobilities Research: Transport Psychology Perspectives. *Mobilities*, 18(2), 167–183.
- Henderson, H. (2023). Calculating the Cost: Place, Mobility and Price in Higher Education Decision-making for Students on Small Islands Around the UK. *Educational Review*, 75(5), 851–870.
- Hermans, K., Saenen, L., Emmers, E., & Struyven, K. (2025). Uncovering school-level influences on equal educational opportunities in secondary education: a systematic review of the interplay among key factors. *Frontiers in Education*, 10, 1568713.
- Li, W., Bai, X., Yang, D., & Hou, Y. (2023). Maritime Connectivity, Transport Infrastructure Expansion and Economic Growth: A Global Perspective. *Transportation Research Part A: Policy and Practice*, 170, 103609.
- Pantouvakis, A., & Gerou, A. (2023). The Role of Onboard Experiencescape and Social Interaction in The Formation of Ferry Passengers' Emotions. *WMU Journal of Maritime Affairs*, 22(3), 365–384.
- Rossi, S. D., Stratford, E., & Byrne, J. (2026). Mobility Matters: Effects of Campus Location on Travel Burden and Educational Equity in a Regional city. *Applied Geography*, 186, 103864.
- Tan, C. Y. (2024). Socioeconomic Status and Student Learning: Insights From an Umbrella Review. *Educational Psychology Review*, 36(4), 100.
- Tan, G. L. C., & Fang, Z. (2023). Family Social and Kultural Capital: an Analysis of Effects on Adolescents' Educational Outcomes in China. *The Journal of Chinese Sociology*, 10(1), 21.
- Unaradjan, D. D. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif - Google Books. In *Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya*.
- Urry, J. (2000). Mobilities for the Twenty-first Century. In *London and New York: Routledge*. Routledge.
- Vagle, M. D. (2018). *Crafting Phenomenological Research* (3rd ed). Routledge.
- Wladis, C., Hachey, A. C., & Conway, K. (2024). It's about time: The Inequitable Distribution of Time as a Resource for College, by Gender and

Race/ethnicity. *Research in Higher Education*, 65(7), 1614–1646.

- Wu, Y., & Wang, J. (2025). The Tension Between Money and Culture: Inequality, Economic Capital, Cultural Capital, and High school students' Educational Achievements From a Comparative Perspective. *American Educational Research Journal*, 62(3), 540–571.
- Yudistira, Sedubun, D. R., & Laamena, N. S. (2025). Application of Spatial Weighted Matrix Based on Transportation Connectivity for Modelling Access to Higher Education in Archipelago Provinces. *AIP Conference Proceedings*, 3293(1), 60005.
- Zahavi, D. (2025). *Phenomenology: the basics*. Routledge.
<https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9781003350682>